

**ANALISIS HUBUNGAN KETERSEDIAAN GEDUNG
PENDIDIKAN SMA/SEDERAJAT DENGAN ANGKA
PARTISIPASI KASAR DI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2017**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi**

Oleh:

MELATI ZAADA RIZKI

E 100 171 179

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS HUBUNGAN KETERSEDIAAN GEDUNG PENDIDIKAN SMA/SEDERAJAT DENGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MELATI ZAADA RIZKI

E 100 171 179

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Desen Pembimbing,



Drs. Priyono., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUBUNGAN KETERSEDIAAN GEDUNG PENDIDIKAN
SMA/SEDERAJAT DENGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017**

OLEH

MELATI ZAADA RIZKI

E 100 171 179

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Geografi

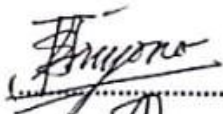
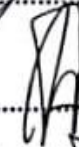
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 18 Oktober 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Priyono, M.Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Dahroni, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Agus Anggoro Sigit, S.Si, M.Sc
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)



Dekan,


Drs. Yuli Ptiyana, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oranglain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta 9 November 2018

Penulis



Melati Zaada Rizki

E100171179

**ANALISIS HUBUNGAN KETERSEDIAAN GEDUNG PENDIDIKAN
SMA/SEDERAJAT DENGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017**

Abstrak

Kabupaten Wonosobo melaksanakan wajib sekolah hingga ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Peraturan tersebut menyimpulkan bahwa ketersediaan gedung pendidikan SMA/ sederajat sangat penting dalam pencapaian wajib sekolah. Ketersediaan gedung pendidikan diharapkan dapat menaikkan partisipasi sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini diperlukan untuk menganalisis hubungan ketersediaan gedung pendidikan SMA/ sederajat terhadap capaian Angka Partisipasi Kasar (APK). Tujuan penelitian yaitu: (1) Melakukan evaluasi sebaran ketersediaan fasilitas pendidikan SMA/ sederajat. (2) Mengkaji capaian Angka Partisipasi Kasar (APK). (3) Menganalisis hubungan ketersediaan gedung pendidikan SMA/ sederajat dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah pengolahan data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan uji *Chi-Square* untuk mengetahui hubungan kedua variable. Hasil penelitian yaitu : (1.A) Hasil evaluasi gedung pendidikan SMA/ Sederajat di Kabupaten Wonosobo menurut jumlah penduduk pendukung menunjukkan hanya terdapat 1 dari 15 kecamatan yang terpenuhi ketersediaannya yaitu Kecamatan Wonosobo. (1.B) Hasil evaluasi gedung pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Wonosobo menurut lokasi menunjukkan 3 dari 15 kecamatan tidak terpenuhi ketersediaannya (2) Perhitungan Angka Partisipasi Sekolah (APK) jenjang pendidikan SMA/ Sederajat menunjukkan hanya terdapat 1 dari 15 kecamatan yang memiliki capaian tuntas yaitu Kecamatan Wonosobo (3.A) Ketersediaan gedung pendidikan menurut jumlah penduduk pendukung dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan nilai signifikansi 0,00 atau dapat diartikan terdapat hubungan terhadap kedua variabel. (3.B) Ketersediaan gedung pendidikan berdasarkan lokasi dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/ sederajat menunjukkan signifikansi 0,605 yang dapat diartikan tidak terdapat hubungan yang mempengaruhi kedua variabel tersebut.

Kata Kunci: APK, *Chi-Square*, Ketersediaan Gedung Pendidikan, SMA

Abstract

Wonosobo Regency was required to implement compulsory school to the high school level. The regulation concluded that the availability of high school education buildings is very important in compulsory school. The availability of educational buildings is expected to increase school participation. Based on these, in this study it is necessary to analyze the relationship of the high school availability education buildings to the Gross Enrollment Rate. The purpose of research are: (1) Evaluate the distribution of Senior High School educational buildings availability. (2) Assessing the Gross Enrollment Rate (APK).(3) Analyzing correlation of Senior High School educational buildings availability with the Gross Enrollment Rate in Wonosobo Regency 2017. This research method used secondary and primary data processing with field surveys. Data analysis method used Chi-Square test to determine the relationship between the two variables. The results obtained are: (1.A) The results of high school education building evaluation in Wonosobo District according to the number of supporting population shows that there is only 1 of the 15 sub-districts which their availability is fulfilled. (1.B) The results of high school education building evaluation in Wonosobo District according to the location showed that 3 of the 15 sub-districts were not fulfilled. (2) the Gross Enrollment Rate of high school in Wonosobo Regency 2017 shows that there are only 1 out of 15 districts that have complete achievements, namely Wonosobo District (3.A) The availability of educational buildings based in the population with the Gross Enrollment Rate of high school in Wonosobo Regency 2017 shows a significance value of 0.00, which means there are relationship both of these variables (3.B) The availability of educational buildings based on location and the Gross Enrollment Rate of high school in Wonosobo Regency 2017 shows a significance value of 0.605 which means there is no relationships that affect both of these variables.

Keyword: Chi-Square, Gross Enrollment Rate, The availability of educational buildings, Senior High School

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan wajib sekolah selama 11,43 tahun, artinya penduduk Kabupaten Wonosobo diharapkan untuk melaksanakan wajib sekolah hingga ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat. Peraturan tersebut menyimpulkan ketersediaan gedung pendidikan SMA/sederajat sangat penting dalam pencapaian wajib sekolah. Ketersediaan sebaran gedung pendidikan SMA/sederajat merupakan salah satu aspek penunjang dalam mengetahui bagaimana berjalannya sistem pendidikan khususnya pada jenjang

SMA/ sederajat. Pemerintah harus mencukupi pemenuhan ketersediaan gedung pendidikan agar tercipta lingkungan dan kondisi belajar mengajar yang ingin dicapai bersama. Distribusi gedung sekolah yang merata di tiap kecamatan menjadi faktor penting dalam capaian ketersediaan pendidikan. Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang terdapat di suatu wilayah. Fasilitas pendidikan yang tersedia akan semakin menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses ilmu pengetahuan apabila angka partisipasi sekolah tinggi. Berdasarkan pentingnya angka partisipasi sekolah, maka dalam penelitian ini diperlukan untuk melakukan perhitungan dan analisis terhadap hubungan ketersediaan gedung pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat.

2. METODE

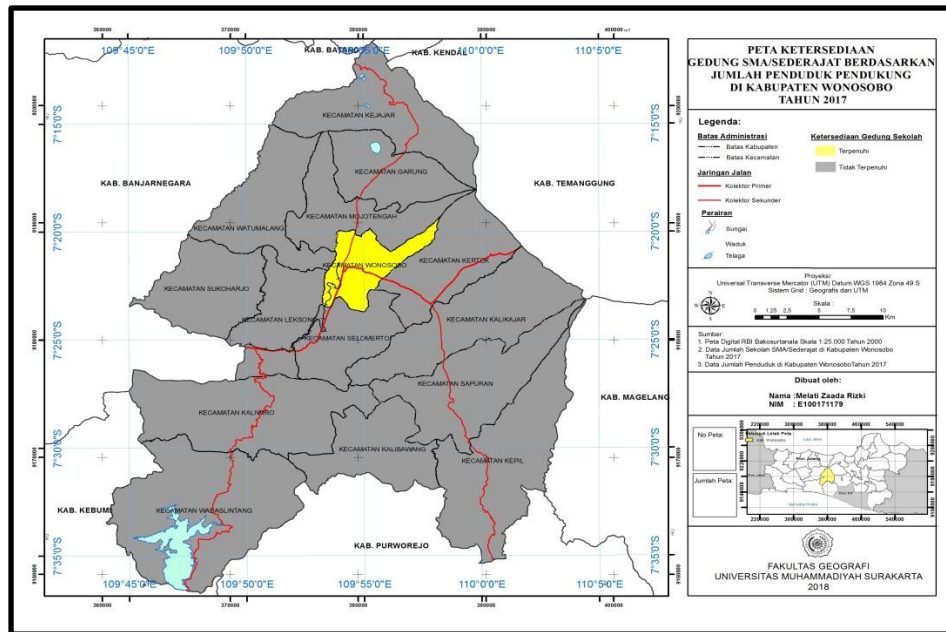
Penelitian ini dilakukan guna menganalisis hubungan ketersediaan gedung pendidikan SMA/ sederajat dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pengumpulan data terbagi dalam dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui instansi atau lembaga terkait. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode observasi lapangan guna mengetahui kemudahan aksesibilitas, Fasilitas dan kondisi lingkungan di lokasi sekolah dijadikan sampel penelitian. Pengolahan data untuk melakukan evaluasi ketersediaan gedung pendidikan menggunakan acuan kebutuhan sarana pendidikan berdasarkan SNI 03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan sedangkan perolehan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) menggunakan perhitungan APK jenjang usia pendidikan SMA berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Hubungan ketersediaan gedung pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) diperoleh melalui tabel silang dengan uji *Chi-Square*. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis spasial. Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan hasil dari perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Wonosobo dan melakukan analisis hasil korelasi ketersediaan SMA/ sederajat dengan APK di Kabupaten Wonosobo tahun 2017. Analisis spasial dilakukan guna mengevaluasi

ketersediaan distribusi gedung pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Wonosobo dan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dilihat berdasarkan posisi, jarak, dan hubungan obyek yang diteliti.

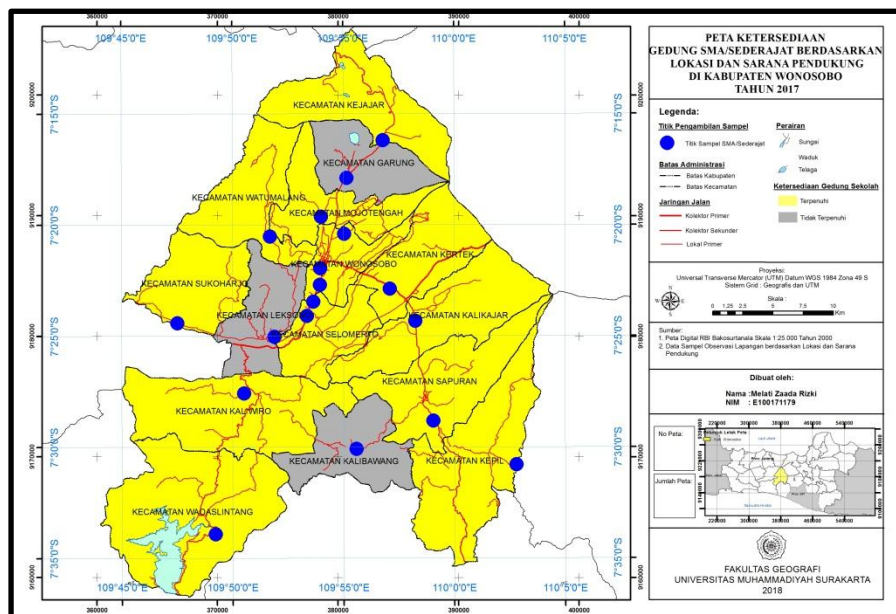
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Ketersediaan Gedung Pendidikan SMA/ Sederajat di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

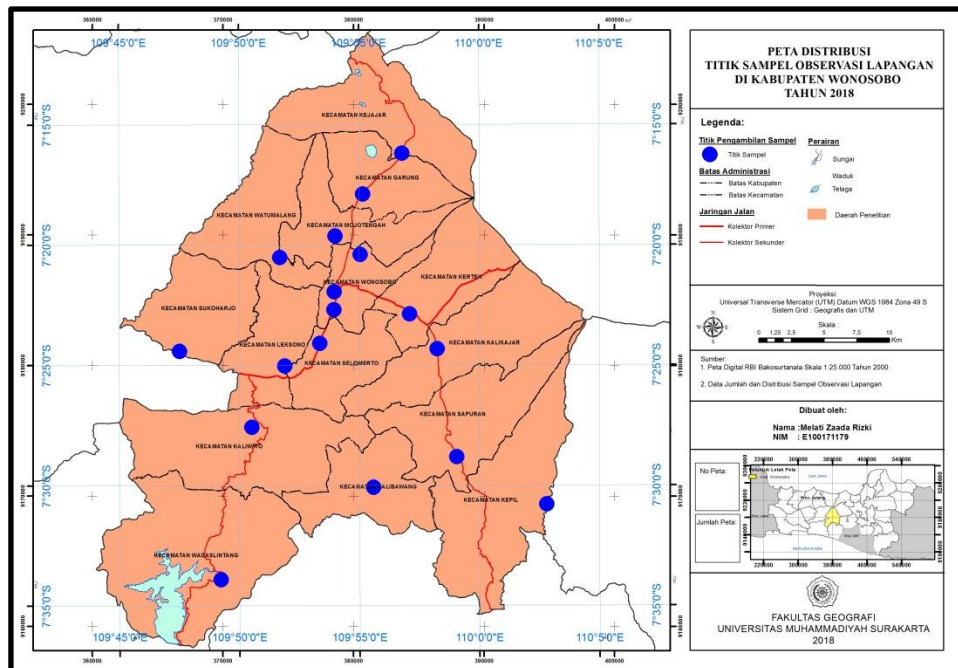
Evaluasi ketersediaan gedung pendidikan SMA/ Sederajat di Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi dua bagian yaitu evaluasi berdasarkan jumlah penduduk pendukung dan evaluasi berdasarkan lokasi. Acuan dalam proses evaluasi menggunakan kriteria kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Evaluasi ketersediaan gedung pendidikan SMA/ Sederajat dilakukan untuk mengetahui keterpenuhan jumlah gedung pendidikan SMA/ Sederajat *existing* terhadap jumlah penduduk, lokasi dan fasilitas pendukung di Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan adalah data jumlah penduduk, jumlah penduduk usia 16-18 tahun, jumlah siswa SMA/ Sederajat dan jumlah SMA/ Sederajat *existing*. Data primer yang digunakan adalah data survey kondisi lapangan mengenai lokasi pada 17 titik sampel.



Gambar 1. Peta Ketersediaan Gedung SMA/Sederajat Menurut Jumlah Penduduk
Pendukung
di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017
(Sumber: Pengolahan Data, 2018)



Gambar 2. Peta Ketersediaan Gedung SMA/Sederajat Menurut Lokasi
di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017
(Sumber: Pengolahan Data, 2018)

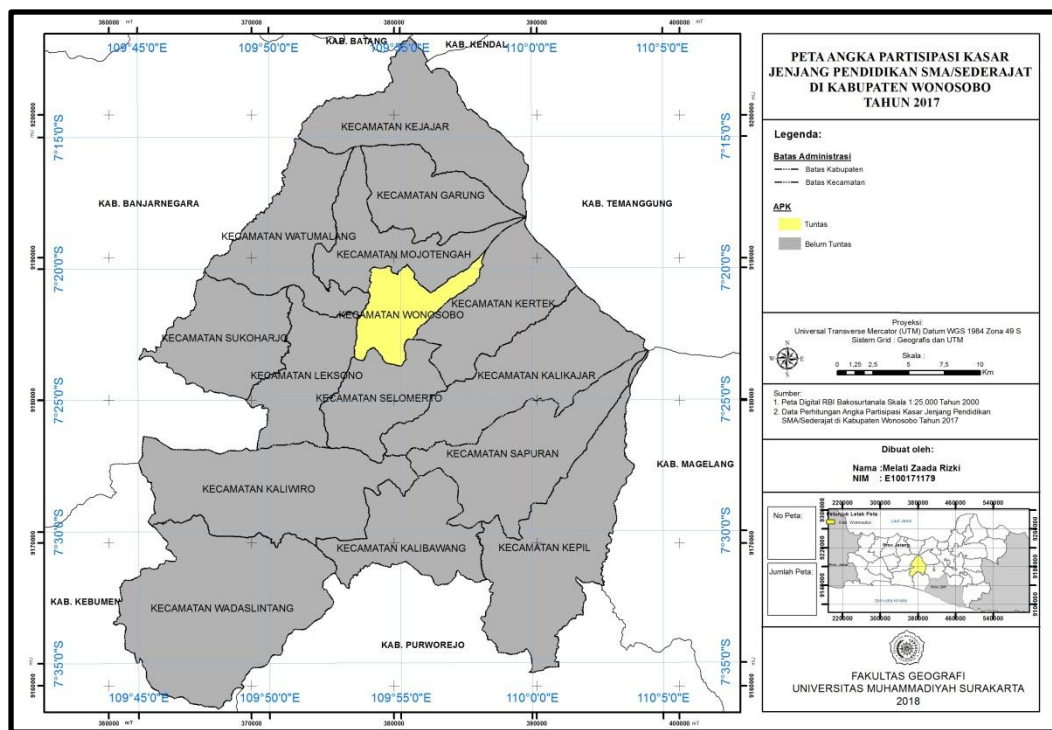


Gambar 3. Peta Distribusi Titik Sampel Observasi Lapangan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
(Sumber: Pengolahan Data, 2018)

Berdasarkan Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 evaluasi gedung pendidikan SMA/Sederajat di Kabupaten Wonosobo menurut jumlah penduduk pendukung menunjukkan hanya terdapat 1 dari 15 kecamatan yang terpenuhi ketersediaannya yaitu Kecamatan Wonosobo. Banyaknya kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi di Kabupaten Wonosobo dapat berimplikasi pada daya tampung yang kurang pada 14 kecamatan yang tidak terpenuhi ketersediaannya. Berdasarkan hasil evaluasi gedung pendidikan SMA/ sederajat menurut lokasi di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa 14 dari 17 titik sampel sudah memenuhi ketersediaannya. Tiga sampel yang tidak terpenuhi berada di Kecamatan Garung, Kecamatan Leksono, Kecamatan Kalibawang. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kesenjangan pendidikan antar kecamatan yang terpenuhi dengan kecamatan yang tidak terpenuhi.

3.2 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

Proses perhitungan APK pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2017. Data yang digunakan mencakup jumlah murid SMA/Sederajat dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/Sederajat pada skala kecamatan di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa dari total jumlah 15 kecamatan hanya 1 kecamatan yang memenuhi kategori ketuntasan menurut nilai ketuntasan wajib belajar (Depdiknas, 2006). Kecamatan yang masuk dalam kategori Tuntas Pratama yaitu Kecamatan Wonosobo.



Gambar 4. Peta Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

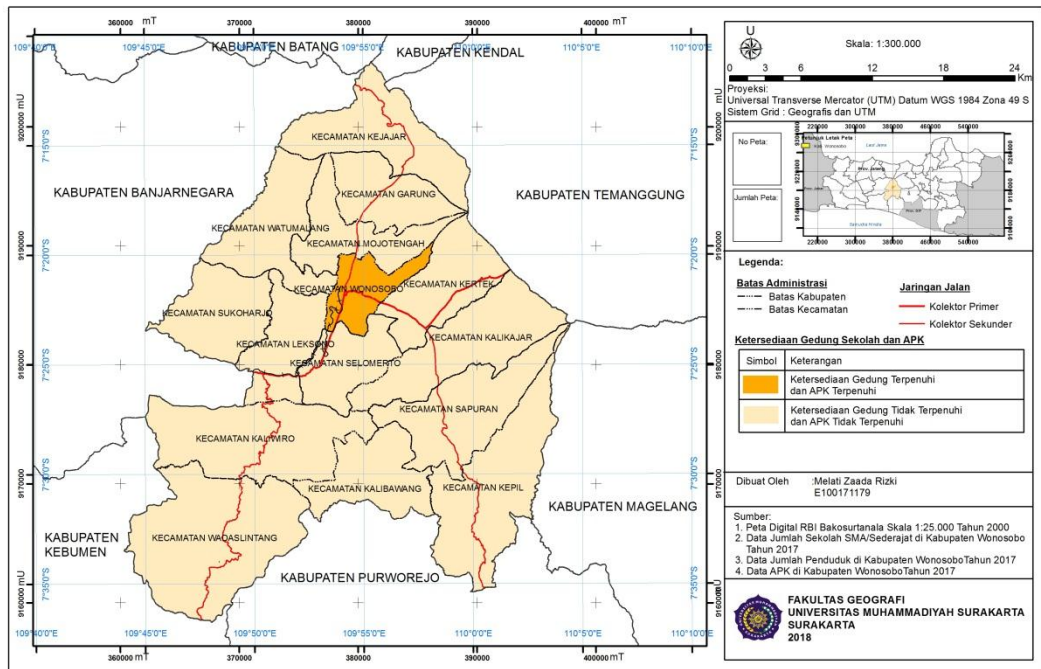
(Sumber: Pengolahan Data, 2018)

Identifikasi Angka Partisipasi Kasar (APK) dengan menggunakan perhitungan berdasarkan Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan dalam perhitungan APK meliputi jumlah penduduk jenjang usia 16-18 tahun dan jumlah siswa

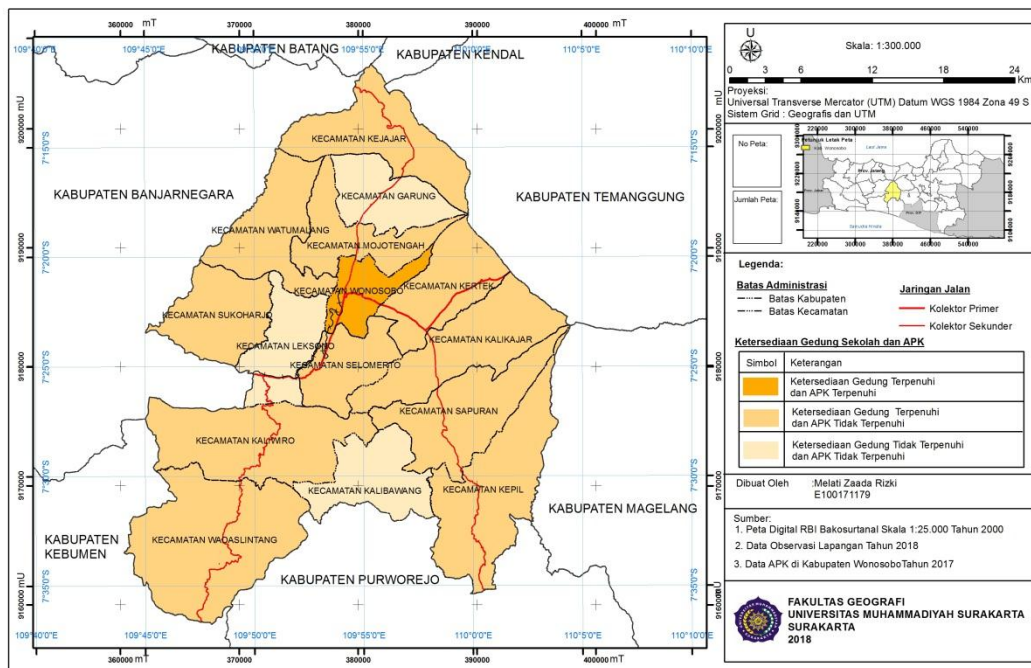
SMA/ sederajat. Berdasarkan data tersebut didapatkan capaian APK per kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Hasil capaian APK digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah yang seharusnya pada suatu jenjang pendidikan. Perhitungan APK pada skala kecamatan di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa dari total jumlah 15 kecamatan hanya 1 kecamatan yang memenuhi kategori ketuntasan menurut nilai ketuntasan wajib belajar. Kecamatan yang memenuhi kriteria tuntas adalah Kecamatan Wonosobo. Berdasarkan hasil tersebut dimana hanya terdapat 1 kecamatan yang memiliki APK yang tuntas menunjukkan capaian yang rendah terhadap partisipasi sekolah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kualitas pendidikan tidak merata di Kabupaten Wonosobo.

3.3 Hubungan Ketersediaan Gedung Pendidikan SMA/ Sederajat dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

Identifikasi hubungan ketersediaan gedung pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dilakukan dengan analisis interpretasi data tabulasi silang . Analisis interpretasi data tabulasi silang digunakan untuk mengetahui hubungan dan adanya pengaruh antara kedua variabel. Ketersediaan gedung pendidikan menurut jumlah penduduk pendukung dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 menunjukkan nilai signifikansi 0,00 atau dapat diartikan tidak terdapat hubungan terhadap kedua variabel. Ketersediaan gedung pendidikan berdasarkan lokasi dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang usia pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 menunjukkan signifikansi 0,605 yang berarti terdapat hubungan yang mempengaruhi kedua variabel tersebut.



Gambar 5. Peta Hubungan Ketersediaan Gedung Pendidikan SMA/Sederajat Menurut Jumlah Pendukung Dengan APK Di Kabupaten Wonorejo
(Sumber: Pengolahan Data, 2018)



Gambar 6. Peta Hubungan Ketersediaan Gedung Pendidikan SMA/Sederajat Menurut Jumlah Lokasi Dengan APK Di Kabupaten Wonosobo
(Sumber: Pengolahan Data, 2018)

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbaikan terhadap keterpenuhan lokasi sekolah dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah.

4. KESIMPULAN

4.1 Hasil evaluasi gedung pendidikan SMA/Sederajat di Kabupaten Wonosobo menurut jumlah penduduk pendukung menunjukkan hanya terdapat 1 dari 15 kecamatan yang terpenuhi ketersediaannya yaitu Kecamatan Wonosobo. Hal tersebut dapat berimplikasi pada keterbatasan daya tampung siswa pada kecamatan-kecamatan lain yang tidak terpenuhi ketersediaan gedung SMA/ sederajat.

4.2 Hasil evaluasi gedung pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Wonosobo menurut lokasi menunjukkan 3 dari 15 kecamatan tidak terpenuhi ketersediaannya. Ke-3 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Garung, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Kalibawang. Hal tersebut

dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses yang baik terhadap kriteria lokasi.

4.3 Perhitungan Angka Partisipasi Sekolah (APK) jenjang pendidikan SMA/Sederajat menunjukkan hanya terdapat 1 dari 15 kecamatan yang memiliki capaian tuntas yaitu Kecamatan Wonosobo. Hasil tersebut menunjukkan APK yang rendah dan dapat mengakibatkan kualitas pendidikan tidak merata di Kabupaten Wonosobo.

4.4 Berdasarkan uji *Chi-Square* disimpulkan bahwa:

- A. Ketersediaan gedung pendidikan menurut jumlah penduduk pendukung dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 menunjukkan nilai signifikansi 0,00 atau dapat diartikan terdapat hubungan terhadap kedua variabel.
- B. Ketersediaan gedung pendidikan berdasarkan lokasi dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 menunjukkan signifikansi 0,605 yang berarti tidak terdapat hubungan yang mempengaruhi kedua variabel tersebut.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbaikan keterpenuhan sekolah menurut jumlah penduduk dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017. Kabupaten Wonosobo.
- Badan Standarisasi Nasional. (2004). *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional
- Filmer, Deon. 2000. *“The Structure of Social Disparities in Education: Gender and Wealth.” Policy Research Working Paper 2268. Washington DC: World Bank.*
- Sugiyono. (1997). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV ALFABETA